

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sepanjang sejarah Indonesia, Kemiskinan adalah isu yang sangat penting. Hampir semua tenaga ahli di Indonesia telah dipanggil untuk menangani masalah kemiskinan ini. Kemiskinan telah menyebabkan banyak masyarakat Indonesia tidak dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Hal ini menyebabkan keterbelakangan, seperti kesulitan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak, kesulitan akses kesehatan bagi penduduk miskin, kurangnya fasilitas umum bagi masyarakat, keterbatasan peluang pekerjaan, minimnya asuransi sosial bagi keluarga miskin, dan lain sebagainya (Rachmad, 2017, hlm.2).

Untuk menilai tingkat kemiskinan, BPS menerapkan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan metode ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan barang non-pangan, yang diukur berdasarkan Garis Kemiskinan.

Jumlah warga kurang mampu di Indonesia pada bulan Maret tahun 2024, jumlah individu yang tercatat adalah 25,22 juta. Bila dibandingkan dengan bulan Maret tahun 2023, angka tersebut telah berkurang sekitar 0,68 juta individu. Dibandingkan dengan September 2022, jumlah orang miskin berkurang sebesar 1,14 juta. Proporsi warga miskin pada Maret 2024 mencapai angka 9,03%. Ini merupakan penurunan sebesar 0,33% poin jika dibandingkan dengan Maret 2023 dan 0,54% poin jika dibandingkan dengan September 2022. Berdasarkan wilayah tinggal, pada rentang Maret 2023 hingga Maret 2024, jumlah warga miskin di daerah perkotaan menurun sebanyak 0,1 juta individu, Sementara itu, di daerah pedesaan terjadi penurunan jumlah individu sebanyak 0,58 juta orang. Jumlah persentase kemiskinan di area urban juga berkurang dari 7,29% menjadi 7,09%.

Sedangkan di pedesaan, angka tersebut mengalami penurunan dari 12,22% menjadi 11,79%. Pada bulan Maret 2024, jumlah rata-rata anggota keluarga yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia adalah 4,78 orang. Dengan demikian, hasil

rata-rata Garis Kemiskinan per rumah tangga adalah Rp2.786.415,00 per bulan (Badan Pusat Statistik, 2024).

Kemiskinan di Jawa Barat Secara umumnya, pada periode di bulan Maret 2018-September 2019 dengan tingkat kemiskinan di Jawa Barat menunjukkan angka menurun baik dari sisi jumlah maupun sisi persentasenya. Periode Maret 2020 sampai September 2020 menyaksikan peningkatan tingkat kemiskinan akibat pandemi *Covid-19*. Mulai dari periode Maret 2021 hingga Maret 2024, tingkat kemiskinan di Jawa Barat kembali mengalami penurunan.

Persentase warga yang hidup dalam kemiskinan Di wilayah Jawa Barat, pada bulan Maret tahun 2024, angka tercatat sebesar 7,46%, yang menunjukkan penurunan sebesar 0,16% poin jika dibandingkan dengan bulan Maret tahun 2023, serta mengalami penurunan sebesar 0,52% poin dibandingkan dengan bulan September tahun 2022. Jumlah total penduduk yang tergolong miskin pada Maret 2024 mencapai 3,85 juta orang, mengalami pengurangan sebanyak 39,93 ribu orang dari Maret 2023 dan menurun sebanyak 204,94 ribu orang jika dibandingkan dengan September 2022.

Sepanjang rentang waktu Maret 2023 hingga Maret 2024, populasi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan di daerah pedesaan berkurang sebanyak 47,21 ribu individu, sedangkan di perkotaan mengalami kenaikan sebanyak 86,27 ribu orang. Namun, persentase kemiskinan menurun baik di area kota maupun di wilayah desa. Di area kota, rasio penduduk yang hidup dalam kemiskinan berkurang dari 7,19% menjadi 7,07%. Di wilayah desa, proporsi kemiskinan turun dari 9,30% menjadi 9,07%. Secara jumlah, proporsi penduduk miskin di Jawa Barat ini, lebih banyak berada di perkotaan. Pada bulan Maret 2024, terdapat 2,92 juta orang yang hidup dalam kemiskinan di daerah perkotaan, sementara 0,93 juta orang miskin lainnya tinggal di daerah pedesaan. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan di daerah pedesaan secara signifikan lebih tinggi jika dibandingkan dengan di daerah perkotaan (Mukti, 2024, hlm.5-6).

Kota Tasikmalaya mengalami penurunan angka kemiskinan. Hal ini dapat diamati dari data Badan Pusat Statistik yang memaparkan data mengenai tingkat kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Di tahun 2023, presentasinya mencapai 11,53%,

tetapi menurun menjadi 11,10% di tahun 2024. Total penduduk yang tergolong miskin berjumlah 76,71 ribu orang dengan batas kemiskinan sebesar Rp.565.377,- per orang setiap bulan. Isu kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan kuantitas dan persentase penduduk yang terjebak dalam kemiskinan. Penting juga untuk memperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Tasikmalaya pada bulan Maret 2024 sebesar 1,35 dan Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,26 (BPS, 2024).

Menurut Yacob (2012) Kemiskinan tetap menjadi tantangan di berbagai negara di seluruh dunia. Kemiskinan adalah masalah mendasar yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dalam kehidupan. Hal ini membuatnya menjadi permasalahan global yang dihadapi oleh berbagai negara (Sandi & Cita, 2021, hlm.14)

Di Indonesia, kemiskinan menjadi permasalahan yang sangat mendesak untuk diselesaikan. Secara umum, terutama di wilayah kelurahan, kondisi masyarakat miskin dapat dilihat dari ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemiskinan adalah kondisi dimana masyarakat mengalami kesulitan, kekurangan daya, dan tidak mampu menyampaikan kebutuhan mereka. Menurut Lewis (1959) dalam Sukes Keppi (2015, hlm.1) Kemiskinan tidak selalu berkaitan dengan masalah terhentinya ekonomi, kekacauan, atau kekurangan sumber daya. Dalam banyak hal, budaya kemiskinan membawa efek yang menguntungkan karena mendukung orang-orang yang kurang mampu dalam menghadapi cobaan hidup.

Sebagian pakar sosial di Indonesia mendiskusikan ide mengenai kemiskinan. Suparlan (1984) dalam Arifin (2020, hlm.117-118) mengungkapkan bahwa kemiskinan merupakan kurangnya aset atau barang berharga yang dialami oleh individu atau kelompok. Ketidakcukupan aset atau barang mengakibatkan individu atau sekelompok orang merasa tidak dapat memenuhi kebutuhan dan menjalani kehidupan dengan baik. Kelemahan ini mungkin hanya berada pada budaya (misalnya; adat, upacara, moral, dan etika), sosial (misalnya; pendidikan, komunikasi, dan interaksi antar individu), atau fisik (misalnya; makanan, pakaian,

tempat tinggal, dan kesehatan). Oleh karena itu, keadaan miskin merupakan situasi kebutuhan primer kemakmuran individu.

Kemiskinan adalah masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai elemen yang saling berhubungan, termasuk: penghasilan, pendidikan, ketersediaan barang dan layanan, tempat tinggal, jenis kelamin, dan keadaan lingkungan di sekitarnya. Kemiskinan tidak selalu disebabkan oleh ketidakmampuan ekonomi. Hal tersebut juga dapat terjadi karena kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan adanya perlakuan diskriminatif terhadap individu atau kelompok yang sedang menjalani kehidupan mereka dengan martabat (Fikri et al, 2016, hlm.1).

Ada dua penyebab utama yang mengakibatkan kemiskinan pada keluarga: 1) Tidak adanya pertumbuhan yang konsisten dalam pendapatan nasional, 2) Tersedianya ketidaksetaraan dalam pembagian pendapatan. Mereka yang tergolong miskin adalah individu yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah batas kemiskinan (Lutfi & Safitri, 2020, hlm.186).

Keadaan di atas seakan menjadi fenomena tak berujung. Sebagian masyarakat umumnya berpandangan bahwa pemerintah Indonesia tidak serius dalam menangani kemiskinan. Beberapa orang menganggap bahwa pemerintah kurang peduli terhadap nasib individu yang berada di bawah batas kemiskinan. Rumah tangga dengan kondisi finansial yang tidak stabil sulit untuk memenuhi kebutuhan harian akibat sumber daya yang terbatas. Keterpurukan ekonomi keluarga dapat disebabkan oleh ketidakstabilan pekerjaan, tingkat pendidikan rendah atau tidak berpendidikan, serta kurangnya asupan gizi yang seimbang.

Bantuan sosial mencakup dukungan yang disalurkan oleh pemerintah kepada penduduk atau komunitas yang memiliki keadaan ekonomi yang lemah, kurang berdaya, atau rentan terhadap isu sosial. Jenis dukungan ini tidak selalu berupa uang tunai, melainkan juga bisa berupa barang atau jasa. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 mengenai Pengeluaran Bantuan Sosial di Kementerian Negara/Lembaga, pengertian program bantuan sosial adalah pengeluaran yang termasuk sebagai aliran uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada individu yang berada dalam keadaan miskin atau tidak mampu untuk melindungi mereka dari kemungkinan risiko sosial, serta

berkontribusi dalam peningkatan kapasitas ekonomi atau kesejahteraan Masyarakat (Firdausu, 2021, hlm.1).

Berdasarkan Kementerian Sosial (2011), program bantuan sosial merupakan dukungan bersifat sementara yang diberikan kepada individu atau keluarga dengan keadaan ekonomi yang kurang beruntung agar dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dengan lebih baik (Nainah et al, 2022, hlm.1282). Program Bantuan Sosial Nontunai adalah suatu program pemerintah untuk memberi dukungan finansial kepada masyarakatnya dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, terutama saat krisis atau untuk kelompok rentan. Jadi, latar belakangnya mencakup kebutuhan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan mendukung pemulihan ekonomi. Program ini sering digunakan selama situasi darurat, seperti pandemi, untuk memastikan akses terhadap kebutuhan dasar.

Salah satu tantangan signifikan yang dihadapi oleh warga di Kelurahan Margabakti adalah minimnya kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dan mempertahankan stabilitas ekonomi rumah tangga. Banyak keluarga yang kesulitan dalam merencanakan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal, baik itu berupa pendapatan, waktu, maupun tenaga kerja. Hal ini menyebabkan beberapa keluarga terjebak dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, bahkan rentan terhadap kemiskinan. Ketidakmampuan dalam mengelola sumber daya secara efisien juga menyebabkan keluarga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta terhalangnya peluang untuk memperbaiki kesejahteraan di masa depan. Kurangnya pengetahuan mengenai cara mengelola dan merencanakan keuangan rumah tangga menjadi salah satu faktor penyebab utama masalah ini.

Selain masalah pengelolaan sumber daya, banyak keluarga di Kelurahan Margabakti yang juga kurang memiliki pengetahuan mengenai cara menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran mereka. Terdapat kasus, keluarga cenderung menghabiskan pendapatan mereka tanpa perencanaan yang matang, yang pada gilirannya mengarah pada defisit anggaran dan masalah keuangan lainnya. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai pentingnya

perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan yang bijak, banyak keluarga yang terjebak dalam siklus utang yang sulit untuk keluar darinya. Selain itu, ketidaktahuan tentang cara mengatur prioritas pengeluaran menyebabkan banyak keluarga lebih banyak menghabiskan uang untuk keperluan ataupun hal-hal yang kurang penting, tanpa memperhatikan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Kondisi ini memperburuk kestabilan ekonomi rumah tangga dan menyulitkan keluarga dalam mencapai kesejahteraan yang diinginkan.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah minimnya pemahaman keluarga mengenai perbedaan antara kebutuhan dan keinginan dalam pengelolaan keuangan. Menurut Ibu Pendamping di PKH masih banyak keluarga di Kelurahan Margabakti yang belum mampu membedakan mana yang merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan, dengan keinginan yang sifatnya lebih konsumtif dan dapat ditunda. Kebingungannya antara kebutuhan dan keinginan ini menyebabkan pemborosan dan pengeluaran yang tidak perlu, sehingga mengurangi potensi untuk menabung atau berinvestasi demi masa depan yang lebih baik. Kurangnya pemahaman ini juga berdampak pada pola konsumsi yang tidak rasional, yang akhirnya memperburuk kondisi keuangan rumah tangga. Untuk itu, penting bagi keluarga untuk mendapatkan edukasi tentang perencanaan keuangan yang memadai, agar mereka dapat mengelola sumber daya secara lebih bijak dan dapat menyeimbangkan antara kebutuhan yang mendesak dan keinginan yang tidak terlalu urgent.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Program Bantuan Sosial Nontunai terhadap Terpenuhinya Kebutuhan Pokok (Studi di Kelompok Penerima Manfaat PKH Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan lata belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pengenalan isu yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah:

1.2.1 Pengetahuan KPM dalam menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran di Kelurahan Margabakti belum optimal.

- 1.2.2 Kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya dan mempertahankan stabilitas ekonomi rumah tangganya masih belum tercapai.
- 1.2.3 Pemahaman KPM dalam menyeimbangkan antara kebutuhan dan keinginan di Kelurahan Margabakti belum tercapai.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang ada pada penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh bantuan sosial nontunai terhadap terpenuhinya kebutuhan pokok di Kelurahan Margabakti?”

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan penelitian ini, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh program bantuan sosial nontunai terhadap terpenuhinya kebutuhan pokok di kelurahan Margabakti.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Secara Teoritis

Kegunaan teoritis yang di peroleh dari penelitian ini akan menambah dan meningkatkan pengetahuan bagi si penulis, memberikan informasi, wawasan, konsep-konsep baru, yang di harapkan dapat menjadi salah satu penunjang dalam proses pengembangan dan menjadikan referensi ilmu pengetahuan untuk para peneliti selanjutnya.

1.5.2 Secara Praktis

1.5.2.1 Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi baru kepada masyarakat terhadap bantuan sosial tunai ini, baik berupa wawasan ataupun pengetahuan.

1.5.2.2 Bagi Lembaga

Dengan adanya penelitian ini Lembaga dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh program bantuan sosial tunai terhadap ekonomi ketahanan ekonomi keluarga dan bisa mengembangkan suatu program guna untuk meningkatkan kualitas program tersebut.

1.5.2.3 Bagi Penulis

Penelitian ini secara praktis dapat menambah pengalaman, wawasan, dan pemahaman penulis dalam bidang akademis maupun non akademis.

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam studi ini bertujuan untuk menyediakan pemahaman yang akurat tentang istilah-istilah yang dipilih sesuai dengan perspektif peneliti. Selain itu, definisi yang bersifat operasional berperan sebagai acuan agar istilah-istilah dalam penelitian ini tidak disalahartikan atau dipahami dengan cara yang keliru. Dengan adanya batasan ini, setiap konsep yang digunakan menjadi lebih terperinci dan jelas. Hal ini membuat proses analisis menjadi lebih sederhana dan interpretasi terhadap pembahasan penelitian tidak salah. Berikut ini adalah definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini:

1.6.1 Bantuan Sosial Nontunai

Program Bantuan Sosial Nontunai merupakan program inisiatif dari pemerintah yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakatnya yang membutuhkan termasuk dalam bentuk uang elektronik ini. Dengan sistem nontunai, diharapkan penyaluran bantuan lebih transparan dan efisien.

1.6.2 Terpenuhinya Kebutuhan Pokok

Terpenuhinya kebutuhan pokok merupakan kebutuhan mendesak yang wajib terpenuhi untuk mempertahankan keberlangsungan hidup fisik maupun mental seseorang. Jika kebutuhan dasar tidak dipenuhi, individu tidak dapat menjalani hidup secara optimal.

1.6.3 Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk dukungan dari Pemerintah Indonesia. Sasaran utamanya adalah meminimalisir angka kemiskinan dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia, khususnya untuk keluarga yang hidup dalam kondisi kurang mampu.